

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Yayasan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Yayasan**

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan merupakan suatu badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan serta digunakan untuk membantu tercapainya tujuan tertentu dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Suatu yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari harta kekayaan sang pendiri yayasan, yang dijadikan sebagai kekayaan awal dari yayasan tersebut. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2021, organ dalam yayasan terdiri dari :

a. Pembina

Organ dalam yayasan yang memiliki kewenangan yang tak diserahkan kepada pengawas maupun pengurus.

b. Pengurus

Organ dalam yayasan yang menjalankan tugas berkaitan dengan segala kepengurusan yayasan yang minimal terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara.

c. Pengawas

Organ dalam yayasan yang memiliki tugas untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan pengawasan serta berwenang memberikan nasihat kepada para pengurus dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yayasan.

Yayasan yang berbadan hukum membuat bentuk hukum tersebut menjadi payung dalam menyiasati segala aktivitas yang berada di luar bidang sosial, kemanusiaan, keagamaan, pendidikan, serta kesehatan sehingga permasalahan ini pun telah menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak masyarakat (publik).

#### **2.1.1.2 Tujuan Yayasan**

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan memiliki fungsi menjadi pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu, misalnya di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Peraturan perundang-undangan tersebut memberi penegasan bahwa yayasan merupakan suatu badan yang berbentuk hukum yang memiliki tujuan dan maksud mencapai segala kegiatan yang berkaitan dengan bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, yang mana yayasan tersebut tetap mempertimbangkan segala persyaratan formal yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan segala kegiatannya.

#### **2.1.1.3 Sumber Pembiayaan / Kekayaan Yayasan**

Sumber pembiayaan yayasan diperoleh dari sebagian atau sejumlah kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri yayasan dalam bentuk

barang maupun dalam bentuk uang. Selain itu, yayasan juga mendapatkan bantuan atau sumbangan yang bersifat tidak mengikat, seperti

- a. Wakaf
- b. Hibah
- c. Hibah wasiat
- d. Perolehan lainnya yang tak bertentangan terhadap Anggaran Dasar Yayasan dan/ atau segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan atau sumbangan yang bersifat tidak mengikat merupakan bantuan atau sumbangan yang sifatnya sukarela yang diperoleh yayasan, baik dari negara, masyarakat, bantuan dari luar negeri, maupun dari pihak-pihak lain yang tak bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, perolehan lain adalah segala bentuk perolehan atau pendapatan yang diperoleh yayasan, baik yang berupa bunga tabungan bank, sewa gedung, dividen, serta perolehan yang berasal dari segala hasil usaha yang dilakukan oleh yayasan.

#### **2.1.1.4 Pola Pertanggungjawaban Yayasan**

Pola pertanggungjawaban pada yayasan memiliki sifat yang vertikal (*vertical accountability*) dan horisontal (*horizontal accountability*). Pertanggungjawaban yang bersifat vertikal (*vertical accountability*) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana kepada pihak otoritas yang lebih tinggi, misalnya berupa pertanggungjawaban yayasan kepada pihak pembina. Sedangkan,

pertanggungjawaban yang bersifat horisontal (*horizontal accountability*) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak publik (masyarakat luas). Kedua jenis bentuk pertanggungjawaban yayasan ini adalah elemen yang sangat penting dalam proses akuntabilitas dan transparansi publik.

#### **2.1.1.5 Struktur Organisasi Yayasan**

Berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan memiliki organ dalam yang berperan penting dalam terlaksananya kegiatan operasional yayasan, yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Pembina merupakan organ yayasan yang memiliki wewenang yang tak diserahkan kepada pihak pengawas dan pihak pengurus yayasan. Kewenangan yang dimiliki oleh pembina yayasan terdiri dari:

- a. Membuat segala keputusan yang berkaitan dengan perubahan terhadap anggaran dasar yayasan.
- b. Mengangkat dan memberhentikan setiap anggota dari pihak pengurus maupun pengawas yayasan.
- c. Menentukan berbagai kebijakan umum yayasan dengan berlandaskan pada anggaran dasar yayasan.
- d. Mengesahkan semua rancangan anggaran tahunan dan program kerja yang dimiliki yayasan.
- e. Menentukan keputusan yang berkaitan dengan pembubaran atau penggabungan yayasan.

Pembina merupakan individu yang mendirikan yayasan dan/ atau mereka yang berdasarkan hasil dari keputusan rapat anggota dianggap memiliki dedikasi atau peran yang tinggi dalam mencapai tujuan dan maksud yang dimiliki oleh yayasan. Pengurus merupakan organ yayasan yang menjalankan segala tugas kepengurusan yayasan. Dan yang terakhir, pengawas merupakan organ yayasan yang memiliki tugas untuk melaksanakan segala kegiatan kepengawasan serta dapat memberikan nasihat terhadap pihak pengurus yayasan dalam menjalankan segala kegiatan operasional yayasan.

#### **2.1.1.6 Akuntansi Yayasan**

Berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2001, yayasan diartikan sebagai suatu badan hukum yang kekayaannya terdiri atas kekayaan yang telah dipisahkan serta ditujukan untuk membantu tercapainya tujuan tertentu, seperti tujuan dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Namun, dengan berjalannya waktu peraturan perundang-undangan tersebut diperbaharui menjadi Undang-undang No. 28 tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan bahwa kekayaan yang dimiliki yayasan baik dalam bentuk uang, barang, ataupun dalam bentuk kekayaan yang lain diperoleh yayasan berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, tidak boleh dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berupa upah, gaji, honorarium, atau dalam bentuk lainnya yang bisa dinilai dengan uang kepada Pengawas, Pengurus, bahkan Pembina. Berikut

merupakan beberapa istilah penting yang ada dalam akuntansi yayasan, yaitu :

a. Pembatasan Permanen

Pembatasan yang terdapat di dalam pemanfaatan sumber daya yang ditentukan oleh pihak pemberi sumber daya atau pihak penyumbang agar sumber daya tersebut bisa dipertahankan dengan permanen. Pihak yayasan diperbolehkan untuk menggunakan sebagian atau semua bentuk penghasilan maupun manfaat ekonomi lain yang diperoleh dari sumber daya tersebut.

b. Pembatasan Temporer

Pembatasan terhadap pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh pihak penyumbang agar sumber daya tersebut bisa dipertahankan sampai pada jangka waktu tertentu atau hingga terpenuhinya suatu kondisi atau keadaan tertentu.

c. Sumbangan Terikat

Sumber daya yang pemanfaatannya dibatasi untuk alasan tertentu yang dilakukan oleh pihak penyumbang. Pembatasan tersebut bisa memiliki sifat yang temporer maupun permanen.

d. Sumbangan Tidak Terikat

Sumber daya yang pemanfaatannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pihak penyumbang.

### 2.1.2 Pelaporan Keuangan Entitas Non Laba Berdasarkan ISAK 35

Laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban dari manajemen atas segala pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh suatu entitas tertentu yang mempunyai tujuan untuk menyajikan dan menyampaikan segala informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, arus kas, dan kinerja keuangan entitas yang memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan bagi para pengguna (*user*) laporan keuangan. Berdasarkan ISAK 35, laporan keuangan yang berasal dari proses atau siklus akuntansi suatu entitas yang berorientasi non laba, antara lain laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berikut adalah penjelasannya.

#### a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang berisikan informasi mengenai posisi aset, liabilitas, dan aset bersih pada periode waktu tertentu. Tujuan dari suatu laporan keuangan adalah untuk menyajikan segala informasi yang berkaitan dengan aset, liabilitas, dan aset bersih serta tentang informasi yang berkaitan dengan hubungan antara elemen-elemen tersebut pada jangka waktu tertentu.

#### b. Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan penghasilan komprehensif merupakan laporan yang berisikan informasi mengenai laporan laba rugi untuk jangka waktu tertentu yang adalah sebagai bentuk gambaran kinerja keuangan yang terjadi selama

jangka waktu tersebut. Selain itu, laporan ini juga mengatur dan mengelola segala informasi yang disampaikan dalam laporan laba rugi, seperti informasi yang berkaitan dengan penghasilan maupun informasi mengenai beban yang dimiliki oleh suatu entitas pada periode waktu tertentu. Berikut adalah berbagai informasi yang disajikan dalam suatu laporan laba rugi :

1. Pendapatan
2. Beban keuangan
3. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas
4. Beban pajak
5. Laba rugi neto.

c. Laporan Perubahan Aset Neto

Berdasarkan ISAK 35, laporan perubahan aset neto menyampaikan segala informasi yang berkaitan dengan aset neto yang dimiliki entitas tanpa adanya pembatasan dari pihak pemberi sumber daya dan aset neto yang dimiliki entitas dengan adanya pembatasan dari pihak pemberi sumber daya.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan segala informasi yang berkaitan dengan penerimaan serta pengeluaran kas dan setara kas dalam jangka waktu tertentu yang dikategorikan menjadi beberapa aktivitas, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas



pendanaan. Informasi yang berkaitan dengan arus kas sangat bermanfaat bagi para pengguna (*user*) laporan keuangan sebagai landasan untuk mengevaluasi kemampuan entitas non laba dalam menghasilkan kas dan setara kas serta untuk mengevaluasi terkait dengan kebutuhan pengguna (*user*) laporan arus kas tersebut.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari semua bentuk laporan yang telah disebutkan sebelumnya. Catatan atas laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyampaikan segala informasi tambahan yang berkaitan dengan perkiraan-perkiraan yang disajikan dalam suatu laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini berisikan rincian-rincian dari suatu perkiraan yang disampaikan dalam laporan keuangan, misalnya berupa informasi mengenai aset tetap. Dalam catatan atas laporan keuangan terdapat rincian nama aset, liabilitas, dan aset neto yang dimiliki entitas. Contohnya, untuk masing-masing aset tetap, dalam catatan atas laporan keuangan akan dijelaskan untuk melakukan perhitungan terkait dengan aset tetap, serta segala kebijakan akuntansi lainnya yang diterapkan dalam entitas tersebut.

### 2.1.3 Teori Institusional (*Institutional Theory*)

Teori institusional (*institutional theory*) merupakan suatu teori yang didasarkan pada pemahaman bahwa untuk bertahan hidup, suatu organisasi

harus mampu memberi keyakinan kepada masyarakat (publik) bahwa organisasi merupakan suatu entitas yang sah (*legitimate*) dan juga layak untuk didukung. Selain itu, teori institusional juga dijadikan sebagai acuan dalam menjelaskan suatu langkah atau tindakan serta dalam pengambilan keputusan pada organisasi sektor publik. Menurut teori institusional, organisasi yang memprioritaskan legitimasi cenderung mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri pada harapan sosial atau harapan eksternal di mana organisasi tersebut berada. Penyesuaian diri pada harapan sosial atau harapan eksternal tersebut bisa membuat munculnya kecenderungan organisasi untuk memisahkan kegiatan-kegiatan mereka yang bersifat internal serta lebih memfokuskan diri pada struktur yang bersifat simbolis kepada pihak-pihak eksternal organisasi. Organisasi sektor publik yang mendapatkan legitimasi akan lebih cenderung mempunyai kesamaan atau isomorfise (*isomorphism*) dengan organisasi sektor publik yang lain (DiMaggio dan Powell, 1983). Organisasi sektor publik tersebut hanya akan mengutamakan pada struktur yang bersifat simbolis kepada pihak-pihak eksternal organisasi sehingga hal-hal atau kegiatan-kegiatan organisasi yang sifatnya internal akan dikesampingkan (Ridha dan Basuki, 2012). Teori institusional organisasi memperkirakan bahwa suatu organisasi bisa menjadi lebih serupa dengan organisasi lainnya karena adanya tekanan institusional, baik yang disebabkan oleh adanya normatif (*normative*), minetik (*minetic*), maupun koersif (*coercive*) (DiMaggio dan Powell, 1983).

#### **2.1.4 Isomorfise Institusional (*Institutional Isomorphism*)**

Isomorfise (*isomorphism*) merupakan suatu proses untuk mendorong suatu unit dalam satu populasi agar menyerupai unit-unit yang lain dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sama (DiMaggio dan Powell, 1983). Masing-masing organisasi mempunyai hal yang sama, yaitu berusaha untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, setiap organisasi akan berusaha menciptakan strategi atau cara guna mencapai keunggulan dalam bersaing, antara lain menerapkan terciptanya transparansi dalam menyusun laporan keuangan.

#### **2.1.5 Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Output atau hasil akhir dari rangkaian proses akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri merupakan suatu laporan yang disusun secara sistematis dan terstruktur mengenai segala bentuk transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan, posisi keuangan, serta tentang kinerja keuangan entitas atau organisasi. Tujuan pokok dari disusunnya suatu laporan keuangan adalah untuk menyajikan berbagai informasi mengenai posisi keuangan, arus kas dan kinerja keuangan entitas pelaporan yang bisa berguna bagi para pengguna (*user*) laporan keuangan dalam proses perencanaan program kerja, penyusunan anggaran, laporan realisasi anggaran, serta sebagai bentuk evaluasi terhadap keputusan yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang dimiliki entitas atau

organisasi tersebut. Oleh sebab itu, sebagai langkah untuk meminimalisir asimetri informasi-informasi laporan keuangan antara pihak internal entitas dan pihak eksternal entitas maka sangat dibutuhkan adanya penerapan transparansi dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menuntut organisasi agar mampu menjadi organisasi yang lebih transparan dalam segala praktiknya, tidak hanya transparan pada jumlah angka yang dirilis dalam laporan keuangan, tetapi juga dalam menjalankan segala aktivitas operasionalnya. Transparansi adalah suatu konsep yang di dalamnya terdapat kejadian atau peristiwa (informasi yang terbuka berkaitan dengan *input*, *output*, dan *outcome*), transparansi proses (informasi yang terbuka berkaitan dengan transformasi yang berlangsung antara *input*, *ouput*, dan *outcome*), transparansi secara *real-time* (informasi yang disampaikan pada saat itu juga), maupun transparansi retrospektif. Indikator-indikator dari transparansi, antara lain:

- a. Penyediaan informasi yang jelas mengenai pertanggungjawaban
- b. Adanya kemudahan dalam mengakses informasi
- c. Menyusun suatu mekanisme atau cara untuk pengaduan jika terdapat kebijakan atau peraturan yang dilanggar
- d. Adanya peningkatan terkait arus informasi bagi masyarakat (publik) melalui kerjasama dengan lembaga non pemerintah maupun melalui media massa.

Menurut DiMaggio dan Powell (2003), berdasarkan teori pelaporan keuangan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya transparansi dalam pelaporan keuangan, antara lain :

- a. Ketika suatu laporan keuangan dipublikasikan secara transparan terdapat sejumlah variabel yang mempengaruhinya.
- b. Penerapan transparansi dalam proses pelaporan keuangan juga bisa terjadi karena adanya regulasi maupun perubahan lingkungan, tetapi dalam perubahan lingkungan (situasi bisnis) juga bisa menghambat terjadinya transparansi apabila setiap norma dan peraturan hukum yang telah berlaku tidak dijalankan dengan baik.
- c. Dalam proses pelaporan keuangan pasti akan muncul penerapan transparansi jika semua anggota organisasi mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan transparansi tersebut serta adanya pengawasan yang baik dalam menjalankan prosesnya.

#### **2.1.6 Komitmen Manajemen**

Komitmen merupakan kemampuan dan kemauan dalam menyelaraskan antara perilaku individu dengan prioritas, tujuan, dan kebutuhan organisasi. Menurut Ridha dan Basuki (2012), isomorfisme normatif berkaitan dengan profesionalisme. Hal tersebut termasuk di dalamnya cara-cara untuk mengembangkan tujuan maupun kebutuhan untuk membantu pemenuhan kebutuhan organisasi yang pada dasarnya mampu mengutamakan misi organisasi tersebut daripada kepentingan

individu. Perubahan komitmen bisa memberikan pengaruh terhadap permasalahan integritas dan karakter dari suatu organisasi. Profesionalisme dalam suatu organisasi bisa diartikan sebagai sikap menjalankan, mengimplementasikan, serta mematuhi suatu hukum dan kebijakan yang berlaku sehingga hal tersebut bisa disebut sebagai perwujudan adanya komitmen dalam organisasi.

Semua prinsip dan nilai kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan yang berlaku adalah sesuatu yang harus dipegang teguh serta harus dilaksanakan oleh setiap organisasi dalam proses pengelolaan informasi keuangannya (PP No. 58/2005, penjelasan Pasal 4 Ayat 1). Kepatuhan dan integritas terhadap kebijakan dan peraturan hukum dapat terwujud apabila dalam organisasi juga terdapat komitmen manajemen yang kuat. Dengan demikian, penerapan transparansi dalam proses pelaporan keuangan pun dapat diwujudkan dengan baik apabila komitmen manajemen dalam organisasi tersebut juga kuat. Semakin kuat suatu komitmen manajemen dalam melaksanakan segala hal sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan aturan yang berlaku maka semakin meningkat pula transparansi dalam organisasi.

### **2.1.7 Tekanan Eksternal**

Isomorfisme koersif (*coercive isomorphism*) adalah sesuatu yang senantiasa dikaitkan dengan lingkungan sekitar organisasi (Ridha dan Basuki, 2012). Isomorfisme koersif sendiri dapat diartikan sebagai sebuah

hasil yang berasal dari tekanan informal maupun tekanan formal dari organisasi lain yang mana organisasi menjadi tergantung dengan harapan yang dihasilkan dari budaya masyarakat di mana tempat organisasi tersebut melakukan fungsinya (DiMaggio dan Powell, 1983). Kekuatan koersif merupakan suatu bentuk tekanan yang bersifat eksternal yang didapatkan dari suatu peraturan, lembaga lain, maupun pemerintah dalam mengadopsi suatu sistem ataupun struktur tertentu (Ashworth *et al.*, 2009). Dengan adanya peraturan yang berlaku maka diharapkan suatu praktik bisa diterapkan dengan lebih baik.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibuat sebagai pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya agar peneliti dapat menambah teori-teori baru untuk melakukan pengkajian atas penelitiannya tersebut. Penulis ingin mengangkat beberapa penelitian untuk dijadikan sebagai acuan guna menambah teori untuk mengkaji penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut adalah beberapa penelitian dari peneliti terdahulu dalam bentuk jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Artikel Jurnal	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen	Ridha & Basuki (2012)	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Tekanan Eksternal Dan Komitmen Manajemen

	Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan		Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Sedangkan, Ketidakpastian Lingkungan Tidak Berpengaruh Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan.
2.	Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen dan Tekanan Eksternal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru	Julita & Efon Sufelah Belian (2012)	Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Sedangkan tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru.
3.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan	Nasrul Kahfi Lubis (2017)	Pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa secara simultan tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan. Adapun pengujian hipotesis kedua membuktikan secara parsial tekanan



			eksternal dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan, sedangkan komitmen manajemen tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan.
4.	Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen, dan Sistem Pengendalian Pemerintah Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu)	Rian Noprizal (2017)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan.
5.	Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Organisasi Pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan	Komang Ayu Tri Wintari&Ketut Alit Suardana (2018)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal, pengendalian internal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen organisasi berpengaruh positif yang signifikan pada transparansi pelaporan keuangan.
6.	Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Akuntabilitas, Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Dan Komitmen Manajemen	Erni Suryandari Fathmaningrum&Giri Bimo Mukti (2019)	Hasil penelitian menunjukan bahwa ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, tekanan eksternal, pengendalian internal, dan komitmen

Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta)		manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
---	--	--

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

1. Pengaruh Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Menurut DiMaggio dan Powell (2012), isomorfisme normatif (*normative*) berkaitan dengan profesionalisme. Perubahan suatu komitmen bisa menimbulkan dampak pada permasalahan integritas dan karakter organisasi. Strategi integritas adalah suatu hal yang lebih dalam, lebih luas, serta lebih menuntut daripada inisiatif terhadap kepatuhan hukum. Kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku dapat terwujud apabila dalam organisasi terdapat komitmen manajemen yang kuat. Institusional merupakan suatu proses dalam organisasi untuk membentuk karakter tertentu berdasarkan komitmen organisasi itu sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai maupun prinsip-prinsip, misalnya dengan menerapkan transparansi dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan organisasi (PP No. 58/2005, Penjelasan Pasal 4 Ayat 1).

Hasil penelitian Ridha dan Basuki (2012) yang berjudul “Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan” menunjukkan bahwa komitmen manajemen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Dalam penelitian tersebut, dinyatakan bahwa semakin kuatnya implementasi dari suatu komitmen manajemen dalam menjalankan segala prosedur dan aturan yang telah ditentukan oleh organisasi maka semakin meningkat pula transparansi dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu :

H1: Komitmen manajemen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

2. Pengaruh Tekanan Eksternal terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Isomorfise koersif (*coercive*) adalah bentuk tekanan yang disebabkan oleh tekanan informal maupun formal yang organisasi dapatkan dari organisasi lain, di mana tempat organisasi tersebut menjalankan tugas atau fungsinya. Tekanan eksternal mampu menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan dan kinerja dalam suatu organisasi.

Hasil penelitian Ridha dan Basuki (2012) yang berjudul “Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan” menunjukkan bahwa tekanan eksternal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Dalam penelitian tersebut, dinyatakan bahwa pada model pengujian statistik diketahui tekanan eksternal menunjukkan tanda positif pada model regresinya yang berarti semakin tinggi tekanan eksternal yang dimiliki suatu organisasi, misalnya terdapat peraturan pemerintah, dorongan dari pihak-pihak tertentu, maupun tekanan dari masyarakat (publik) maka semakin cepat pula proses penerapan transparansi dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini, yaitu :

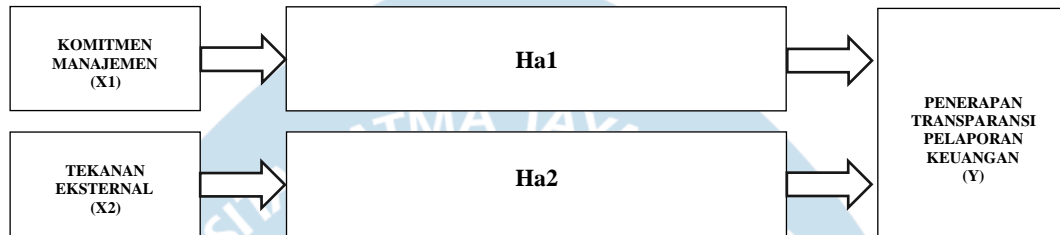
H2: Tekanan eksternal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

#### **2.4 Kerangka Konseptual Penelitian**

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini, antara lain komitmen manajemen (X1) dan

tekanan eksternal (X2). Sedangkan, untuk variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah penerapan transparansi pelaporan keuangan (Y).

Kerangka konseptual dalam penelitian ini, yaitu



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian